



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Ancaman terhadap Kepentingan Nasional Iran di
Afghanistan Pasca Pengambilalihan Taliban

Skripsi

Oleh
Gisella Linardy
6091901007

Bandung
2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Ancaman terhadap Kepentingan Nasional Iran di
Afghanistan Pasca Pengambilalihan Taliban

Skripsi

Oleh

Gisella Linardy

6091901007

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Gisella Linardy
Nomor Pokok : 6091901007
Judul : Ancaman terhadap Kepentingan Nasional Iran di Afghanistan Pasca Pengambilalihan Taliban

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 18 Januari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Putu Agung Nara Indra, S.IP.,M.Sc.

: 

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira

: 

Anggota

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gisella Linarydy

NPM : 6091901007

Jurusan/Program Studi : Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Judul : Ancaman terhadap Kepentingan Nasional Iran di Afghanistan Pasca Pengambilalihan Taliban

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 6 Januari 2023



Gisella Linarydy

ABSTRAK

Nama : Gisella Linardy
NPM : 6091901007
Judul : Ancaman terhadap Kepentingan Nasional Iran di
Afghanistan
Pasca Pengambilalihan Taliban

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Iran di Afghanistan. Berangkat dari hal tersebut, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana situasi keamanan pasca pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Iran?”** Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis akan menggunakan Teori Neo Realisme oleh Kenneth N. Waltz, *Threat Perception Theory* oleh Raymond Cohen, dan Konsep Kepentingan Nasional oleh Donald E. Nuechterlein. Dalam penelitian berikut, penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan studi literatur dan studi pustaka sebagai bagian dari teknik pengumpulan data yang deskriptif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menghasilkan dua temuan utama. Pertama, menguatnya persepsi ancaman Iran semenjak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan dilatarbelakangi oleh enam faktor predisposisi yang mencakup faktor historis; pengalaman ancaman yang dialami Iran; keseimbangan kemampuan antara Iran dengan Emirat Islam Afghanistan; pengaruh birokrasi Iran dalam mempersepsikan ancaman; pelanggaran perjanjian internasional dan norma perilaku sebagai kerangka yuridis oleh Emirat Islam Afghanistan; serta kepentingan Iran di Emirat Islam Afghanistan. Kedua, pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban telah mengancam sejumlah kepentingan nasional Iran di Afghanistan yang mencakup pertahanan negara, kesejahteraan ekonomi, stabilitas tatanan dunia, dan ideologi bangsa.

Kata Kunci: Iran, Afghanistan, Taliban, Persepsi Ancaman, Kepentingan Nasional

ABSTRACT

Nama : Gisella Linardy
NPM : 6091901007
Judul : *Taliban Takeover Threatens Iran's National Interests in Afghanistan*

*This study aims to analyze how the process of Taliban take over can be perceived as a threat to Iran's national interests in Afghanistan. Based on this discussion, the author formulates a research question, namely "**How is the security situation after the Taliban's takeover in Afghanistan can be perceived as a threat to Iran's national interests?**" In order to answer these research questions, the authors will use Neo Realism Theory by Kenneth N. Waltz, Threat Perception Theory by Raymond Cohen, and the Concept of the National Interest by Donald E. Nuechterlein. In the following research, the authors will use qualitative methods by utilizing literature and literature studies as part of a descriptive data collection technique. Based on the analysis performed, the authors produced two main findings. First, the strengthening of Iran's threat perception since the Taliban returned to power in Afghanistan is motivated by six predisposing factors which include historical factors; Iran's threat experience; balance of capabilities between Iran and the Islamic Emirate of Afghanistan; the influence of the Iranian bureaucracy on perceived threats; violation of international treaties and norms of conduct as a juridical framework by the Islamic Emirate of Afghanistan; and Iranian interests in the Islamic Emirate of Afghanistan. Second, the Taliban takeover has threatened a number of Iran's national interests in Afghanistan which include national defense, economic prosperity, world order stability, and national ideology.*

Keywords: Iran, Afghanistan, Taliban, Threat Perception, National Interest

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca penarikan pasukan Amerika Serikat, Taliban berhasil mengambil alih Afghanistan sepenuhnya pada tanggal 15 Agustus 2021 dan memegang kendali efektif negara sebagai pemerintah sementara.¹ Bersamaan dengan itu, pemerintah pusat Afghanistan pun runtuh dan ditandai oleh Presiden Ashraf Ghani yang melarikan diri dari negara untuk menghindari kelompok militan Taliban.² Kembalinya Taliban sebagai penguasa di Afghanistan memiliki implikasi mendalam terhadap stabilitas kawasan, terutama Iran sebagai salah satu negara tetangganya. Hal ini menjadi penting untuk dibahas sebab Iran telah menjalin hubungan kerja sama yang erat, baik dengan Afghanistan maupun Taliban demi mengamankan kepentingan nasionalnya.³ Tidak hanya itu, lokasi strategis Afghanistan meningkatkan kemampuan negaranya untuk mempengaruhi stabilitas kawasan secara keseluruhan.⁴ Sehingga pergeseran kekuasaan di Afghanistan akan membuat Iran menjadi rentan terhadap krisis dan memperkuat persepsi ancamannya. Pada gilirannya, keadaan ini akan

¹ Yaroslav Trofimov, "How the Taliban Overran the Afghan Army, Built by the U.S. Over 20 Years," *Wall Street Journal*, 14 Agustus 2021, sec. World, <https://www.wsj.com/articles/afghanistan-army-collapse-taliban-11628958253>.

² Khadim Hussain, "Iran's Perception towards the Idea of New World Order", *International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature* 9, no. 11 (November 2021): 42-43.

³ Ghulam Mustafa, Mansoor Ahmed, dan Aamir Junaid, "Role of China and Iran in Afghanistan Peace Process," *Sir Syed Journal of Education & Social Research* 3, no. 4 (2020): 427-428. [https://doi.org/10.36902/sjesr-vol3-iss4-2020\(424-432\)](https://doi.org/10.36902/sjesr-vol3-iss4-2020(424-432)).

⁴ Mohsen M. Milani, "Iran's Policy towards Afghanistan," *Middle East Journal* 60, no. 2 (2006): 236, <https://www.jstor.org/stable/4330248>.

menciptakan ketidakstabilan dan mengancam pemenuhan kepentingan nasional Iran.

Pergeseran keseimbangan dalam waktu singkat ini dipicu oleh penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) sepenuhnya dari Afghanistan setelah 20 tahun sejak invasinya pada tahun 2001 sebagaimana dikemukakan oleh Presiden AS, Joe Biden. Penarikan pasukan AS pada 31 Agustus 2021 menjadi titik balik yang signifikan sebab berhasil mengakhiri kontrol AS atas politik Afghanistan.⁵ Keputusan AS untuk mengakhiri pendudukannya di Afghanistan ditandai melalui penandatanganan perjanjian damai dengan Taliban di Qatar pada 29 Februari 2019. Perjanjian berikut memiliki empat pembahasan utama yang mencakup mengurangi tingkat kekerasan, memulai negosiasi intra-Afghanistan yang dikenal sebagai *Intra-Afghan talks*, penarikan pasukan asing dari tanah Afghanistan, serta memastikan Afghanistan tidak menjadi *safe haven* bagi kelompok teroris, khususnya Al-Qaeda.⁶ Sehubungan dengan itu, Iran pun memainkan peran penting dalam proses perdamaian dengan memfasilitasi dialog antara delegasi Taliban dengan perwakilan dari pemerintahan Afghanistan.

Hingga akhirnya proses pengambilalihan Afghanistan dimulai pada 1 Mei 2021 melalui serangan yang dikenal sebagai *2021 Taliban Offensive* hingga mencapai puncaknya ketika Taliban berhasil menguasai ibu kota

⁵ Akram Hosam, "Iran and the Struggle between Regional and International Powers in Afghanistan after the Us Withdrawal," *Journal for Iranian Studies* 5, no. 14 (November 2021): 25.

⁶ Lutfurahman Aftab, "Implication of Taliban's Recent Relationship with Neighboring Countries and Its Impact on the Current Peace Process," *International Scholarly and Scientific Research & Innovation* 15, no. 12 (2021): 990.

Afghanistan yaitu Kabul tanpa perlawanan.⁷ Sejak Taliban mengambil alih Kabul, Iran telah menyesuaikan pendekatannya dengan membangun hubungan yang lebih mendalam walaupun keduanya telah memiliki hubungan yang relatif dekat. Buktinya, tidak lama setelah Taliban menguasai kontrol pemerintah sepenuhnya, Menteri Luar Negeri Taliban, Maulvi Amir Khan Mutaqqi memutuskan untuk mengunjungi Iran. Kunjungan diplomatis berikut ditujukan untuk memperdalam pembahasan mengenai isu ekonomi, perbatasan, serta pengungsi yang keduanya hadapi.⁸ Walaupun Iran menyambut baik kepergian pasukan asing dari Afghanistan dan terutama dari sekitar perbatasannya, namun para pembuat keputusan Iran menghadapi berbagai kekhawatiran.⁹ Faktanya, sampai dengan saat ini, Iran belum mengakui pemerintahan sementara Taliban sebab mereka belum mampu mewujudkan pengaturan politik yang inklusif dalam pemerintahan Afghanistan dan memastikan adanya perdamaian di dalam negeri.¹⁰

⁷ Yaroslav Trofimov, "How the Taliban Overran the Afghan Army, Built by the U.S. Over 20 Years," *Wall Street Journal*, 14 Agustus 2021, sec. World, <https://www.wsj.com/articles/afghanistan-army-collapse-taliban-11628958253>.

⁸ "Foreign Minister Maulvi Amir Khan Mutaqqi Met with Iranian Foreign Minister Abdullahian during the OIC International Conference on Afghanistan. – Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan," Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan, 19 Desember 2021, <https://mfa.gov.af/en/foreign-minister-maulvi-amir-khan-muttaqi-met-with-iranian-foreign-minister-abdullahian-during-the-oic-international-conference-on-afghanistan/>.

⁹ Hosam, "Iran and the Struggle between Regional and International Powers in Afghanistan after the Us Withdrawal," 31.

¹⁰ Umer Karim, "Uneasy Relations: Geopolitical Challenges for Iran on Its Eastern Border," Arab Gulf States Institute in Washington, 4 Maret 2022, <https://agsiw.org/uneasy-relations-geopolitical-challenges-for-iran-on-its-eastern-border/>.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Semenjak rezim pertama Taliban yang dikenal sebagai *Islamic Emirate of Afghanistan*, pendekatan Iran telah mengalami perubahan signifikan. Sebab terlepas dari kedekatannya saat ini, keduanya memiliki hubungan yang bergejolak karena Taliban tidak segan-segan untuk menegakkan hukum Islam yang keras. Situasi keamanan saat itu sangat buruk dan hampir berujung pada krisis kemanusiaan.¹¹ Potensi krisis ini dipicu oleh tingginya angka kelaparan, pendiskriminasian bagi kaum minoritas, serta terjadinya pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil Afghanistan.¹² Pada periode berikut, para pemimpin Iran khawatir kekuasaan Taliban di Afghanistan akan mengancam keamanan perbatasan timurnya dengan meningkatnya jumlah perdagangan narkoba dan pengungsi.

Saat itu, Emirat Islam Afghanistan dipandang sebagai musuh alami Iran karena keduanya saling bertentangan secara ideologis. Di satu sisi, sebagian besar masyarakat Iran menganut ajaran Islam Syiah dan bahkan mengkonsiderasi negaranya sebagai pelindung sesama umat Syiah di dunia. Salah satunya yaitu dengan melindungi etnis Hazara, sebuah etnis minoritas di Afghanistan memiliki kedekatan budaya serta agama dengan Iran karena

¹¹ Abubakar Siddique, "Are the Taliban Committed to Negotiating Peace in Afghanistan?," *Gandhara*, 31 Maret 2020, <https://gandhara.rferl.org/a/are-the-taliban-committed-to-negotiating-peace-in-afghanistan-/30520521.html>.

¹² Kamal Matinuddin, *The Taliban Phenomenon: Afghanistan 1994–1997* (Karachi: Oxford University Press, 1999) 42-43.

sama-sama mempraktekkan Islam Syiah. Sementara di sisi lain, mayoritas penduduk Emirat Islam Afghanistan memeluk Islam Sunni sebagai ajaran utamanya sehingga penganiayaan yang dilakukannya terhadap komunitas Syiah di Afghanistan telah menciptakan semacam ketegangan tertentu.¹³

Perselisihan antar kedua negara mencapai puncaknya ketika pasukan Taliban membunuh sebelas warga sipil Iran, yang terdiri dari sepuluh diplomat dan seorang jurnalis pada tahun 1998. Iran bahkan mempertimbangkan untuk menginvasi Afghanistan namun, konflik ini dapat terhindari karena Taliban membebaskan puluhan sandera Iran setelah dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁴ Oleh sebab itu, pemerintah Iran memutuskan untuk mengubah pendekatannya dengan mulai mendukung Aliansi Utara dalam perjuangannya melawan rezim Taliban. Iran kerap menyediakan logistik yang dibutuhkan oleh Aliansi Utara hingga akhirnya mereka berhasil menggulingkan rezim Taliban melalui invasi militer AS yang dikenal sebagai *Operation Enduring Freedom*. Pemerintah Iran juga berpartisipasi aktif dalam *Bonn Agreement*, sebuah perjanjian untuk membangun kembali konstitusi demokratis di Afghanistan.¹⁵

Namun demikian, terdapat perubahan besar dalam hubungan Iran dan AS akibat pengumuman Presiden AS, George W. Bush yang

¹³ Hamoon Khelghat-Doost, "To Engage or Not to Engage? Iran and the 'New' Taliban," *Gulf International Forum*, 6 Oktober 2021, <https://gulif.org/to-engage-or-not-to-engage-iran-and-the-new-taliban/>.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sumitha Narayanan Kutty, "Iran's Continuing Interests in Afghanistan," *The Washington Quarterly* 37, no. 2 (2014): 139, <https://doi.org/10.1080/0163660x.2014.926214>.

memutuskan untuk menempatkan Iran sebagai salah satu negara “*Axis of Evil*” dengan menuduh pemerintah sebagai pendukung kelompok teroris dan sedang mengembangkan senjata pemusnah massal.¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, kehadiran pasukan militer AS di Afghanistan telah menempatkan Iran di bawah tekanan sistem internasional dan bahkan berpotensi mengancam keamanan nasional Iran terutama sejak munculnya bukti bahwa pesawat tak berawak AS digunakan untuk kegiatan spionase. Pemerintah Iran khawatir AS akan melakukan serangan udara terhadap fasilitas nuklirnya.¹⁷ Dalam hal ini, ancaman keamanan yang muncul dari kehadiran AS menimbulkan kesan bahwa Iran sedang dikepung oleh militer AS di sekitar perbatasannya. Maka dari itu, Iran menentang keberadaan AS dan berusaha mengurangi kekuasaan yang dimilikinya.

Intensitas konflik antara keduanya memaksa Iran untuk mengadopsi pendekatan baru yang berlawanan dengan kebijakan sebelumnya, dengan bekerja sama dengan Taliban. Berdasarkan perspektif Iran, melalui kerja sama berikut, ia mampu menunjukkan kapasitas destruktifnya terhadap AS ketika menghadapi ancaman keamanan.¹⁸ Dengan kata lain, Taliban berperan sebagai *proxy* atau perwakilan Iran di Afghanistan untuk melindungi keamanan nasionalnya sekaligus mengamankan kepentingan nasional lainnya.

¹⁶ Parisa Abbasian, “My Enemy’s Enemy: Iran’s Approach to the Re-Emergence of the Taliban,” *Journal of Asian Security and International Affairs* 9, no. 3 (November 2022): 497, <https://doi.org/10.1177/23477970221130144>.

¹⁷ *Ibid.*, 498.

¹⁸ *Ibid.*

Sama halnya, meluasnya pengaruh AS di Afghanistan telah mengikis kekuasaan Taliban sehingga kelompoknya membutuhkan dukungan kuat untuk mempertahankan posisinya. Oleh karena itu, Iran memutuskan untuk memberikan dukungan politik, pelatihan militer, dan persenjataan kepada militan Taliban garis keras sejak tahun 2005 guna melawan pasukan AS di Afghanistan.¹⁹ Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan keduanya terus berkembang menjadi lebih produktif hingga Taliban pun mendirikan kantor tersendiri di Teheran. Terutama sejak pengumuman AS mengenai penarikan pasukan, pemerintah Iran mulai mengakui hubungannya dengan Taliban secara terbuka di tahun 2015.²⁰ Dengan mengacu pada dinamika hubungan diatas, terlihat ada pergeseran persepsi Iran yang awalnya melihat rezim Taliban sebagai ancaman berubah menjadi *proxy* untuk membantunya mencapai kepentingan nasionalnya di Afghanistan.

Namun, terlepas dari segalanya, Iran tetap melihat kembalinya Taliban sebagai pemerintah berkuasa berpotensi menimbulkan resiko yang sama besarnya dengan imbalan. Pandangan ini muncul karena keduanya memiliki perbatasan langsung sepanjang 921 kilometer dan sejak berkuasa, Taliban telah meningkatkan sumber dayanya secara konstan.²¹ Serta jika benar terbukti Taliban mengimplementasikan kebijakan yang serupa

¹⁹ Shahram Akbarzadeh and Niamatullah Ibrahim, "The Taliban: A New Proxy for Iran in Afghanistan?," *Third World Quarterly* (2019): 5, <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1702460>.

²⁰ Shahram Akbarzadeh, "Iran's Policy towards Afghanistan," *Journal of Asian Security and International Affairs* 1, no. 1 (2014): 75, <https://doi.org/10.1177/2347797013518402>.

²¹ "Iran - the World Factbook," *Central Intelligence Agency*, 11 April 2022, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/>.

dengan pemerintahan periode pertamanya maka akan muncul berbagai masalah, dimulai dari masalah pembangunan, hak asasi manusia, hingga terorisme. Permasalahan berikut menjadi lebih rumit mengingat banyaknya kepentingan Iran di Afghanistan.²² Oleh sebab itu, penting untuk diteliti bagaimana pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban dapat mempengaruhi atau bahkan mengancam kepentingan nasional Iran.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi masalah berdasarkan isu, kerangka pemikiran, aktor, dan waktu untuk mencapai hasil penelitian yang komprehensif. Penulis akan membatasi isu penelitian pada bagaimana persepsi ancaman yang ditimbulkan setelah proses pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban berpotensi mengancam kepentingan nasional Iran. Aktor utama yang akan dikaji pada penelitian berikut adalah Iran, Afghanistan, dan rezim Taliban. Penulis membatasi jangka waktu penelitian dari tahun 2021, tepatnya saat Taliban berhasil mengambil alih Afghanistan hingga tahun 2022 sesuai dengan ketersediaan data terbaru sebab isu berikut masih berlangsung.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yaitu “**Bagaimana pengambilalihan**

²² Suhrab Ahmad and Nelofar Ihsan, “Analyzing the Historical Perspective of Taliban in Order to Understand the Re-Emergence of Taliban and Future Prospects for Neighboring Countries,” *Pakistan Journal of Social Research* 03, no. 01 (2021): 93-95, <https://doi.org/10.52567/pjsr.v3i01.190>.

Afghanistan oleh Taliban dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Iran?”

Adapun secara lebih detail, pertanyaan yang akan dicoba dijawab dalam pertanyaan ini adalah

1. Bagaimana Iran mempersepsikan situasi keamanan yang terjadi di Afghanistan pasca pengambilalihan Taliban sebagai ancaman?
2. Bagaimana pengambilalihan Taliban mengancam kepentingan nasional Iran di Afghanistan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana proses pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Iran di Afghanistan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara kedua negara, penelitian ini akan menganalisis bagaimana persepsi ancaman Iran terbentuk terlebih dahulu dengan menggunakan *Threat Perception theory* yang dikemukakan oleh Raymond Cohen. Lebih lanjut, penelitian berikut bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengambilalihan kekuasaan Taliban di Afghanistan berpotensi mengancam kepentingan nasional Iran. Analisis pun akan didasarkan pada konsep Kepentingan Nasional oleh Donald E. Nuechterlein yang terdiri dari kepentingan pertahanan,

kepentingan tatanan dunia, kepentingan ekonomi, serta kepentingan ideologi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Terdapat sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan sebagai syarat lulus dari Universitas Katolik Parahyangan. Melalui penelitian berikut, penulis mendapat kesempatan untuk meningkatkan pemahamannya mengenai isu yang diangkat, tepatnya bagaimana proses pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban mampu mengancam kepentingan nasional Iran di Afghanistan. Bagi para pembaca yang berminat pada studi mengenai Iran, Afghanistan, dan Taliban, besar harapan penulis agar penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai acuan. Harapannya, penelitian berikut mampu dipergunakan sebagai tambahan informasi bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang berusaha meneliti dinamika politik dan keamanan.

1.4 Kajian Literatur

Penulis akan menggunakan sejumlah penelitian terdahulu mengenai hubungan Iran dengan Taliban untuk mengetahui kepentingan nasional Iran di Afghanistan serta kepentingan apa saja yang mungkin terdampak dengan adanya pengambilalihan oleh Taliban. Literatur pertama yang akan digunakan adalah jurnal karya Carlos Branco dengan judul *Iran's National Security and Afghanistan Crisis: Unpacking the Impacts of the Taliban's Takeover of Power on Iranian National Security*. Jurnal berikut menjelaskan bagaimana bagaimana penarikan pasukan Amerika Serikat dari

Afghanistan dan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 2021 telah menciptakan tantangan keamanan nasional baru bagi Iran. Sejumlah tantangannya yaitu meningkatnya perdagangan narkoba dan meningkatnya arus pengungsi dari Afghanistan yang akan menciptakan memperumit keadaan ekonomi, keamanan, serta sosial masyarakat Iran. Permasalahan ini menjadi signifikan terutama karena perekonomian Iran sedang mengalami kesulitan akibat sanksi ekonomi dari AS. Tantangan lainnya yang memiliki konsekuensi besar juga adalah meningkatnya serangan terorisme terhadap Iran atau bahkan bertambahnya aktivitas pemberontakan di dalam Iran sendiri. Menurut Branco, ancaman-ancaman akan semakin intens dalam beberapa tahun mendatang.²³

Literatur selanjutnya yaitu *The Taliban: A New Proxy for Iran in Afghanistan* yang ditulis oleh Shahram Akbarzadeh dan Niamatullah Ibrahim. Melalui tulisannya, penulis berusaha menjelaskan bahwa Iran memandang Taliban sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingannya di Afghanistan. Kepentingan yang dimaksud adalah meningkatnya pengaruh AS di Afghanistan dan munculnya *Islamic State – Khorasan Province* (ISKP). Dalam konteks ini, Iran menggunakan Taliban sebagai pelindung melawan ISKP sekaligus alat untuk menggagalkan tujuan AS di kawasan, melalui Afghanistan. Akan tetapi, penulis menyatakan bahwa penggunaan Taliban sebagai perwakilan (*proxy*) Iran di Afghanistan akan bersifat

²³ Pourya Nabipour, Vida Yaghooti, dan Ali Khansari, "Iran's National Security and Afghanistan Crisis. Unpacking the Impacts of the Taliban's Takeover of Power on Iranian National Security," *Ukrainian Policymaker* 9 (2021): 38-50.

kontraproduktif dalam jangka panjang sebab tindakannya akan memperburuk ketidakstabilan kawasan, yang sebetulnya ingin diatasi oleh kepemimpinan Iran. Tidak hanya itu, apabila kekuatan Taliban semakin meningkat maka akan menciptakan ketidakstabilan baik di Afghanistan maupun Iran.²⁴

Terakhir, terdapat literatur dari Sumitha Narayanan Kutty yang berjudul *Iran's Continuing Interests in Afghanistan*. Dalam tulisannya, Sumitha menjelaskan bahwa Iran memiliki sejumlah tujuan strategis di Afghanistan yang tidak dapat dinegosiasikan. Pertama, Iran menginginkan pemerintah pro-Iran di Kabul. Kedua, Iran berupaya melindungi aktor ekonomi dan industrinya yang terletak di Afghanistan dari serangan Taliban jika AS sudah menarik pasukannya. Ketiga, perlindungan terhadap etnis yang berasosiasi dengan Iran, seperti etnis Hazara di Afghanistan baik dari Taliban maupun pemerintahan Afghanistan. Keempat, Iran ingin mempertahankan pengaruh ekonomi dengan berperan sebagai rute transit ke Asia Tengah dan Eropa. Terakhir, Iran berusaha menyelesaikan konflik air yang terjadi antar kedua negara. Untuk mencapai kepentingannya, Afghanistan telah memanfaatkan tiga instrumen utama yaitu instrumen militer, ekonomi, dan etnis. Sumitha juga menambahkan bahwa meskipun terdapat pergantian rezim pemerintahan, kepentingan nasional Iran terhadap Afghanistan tidak akan berubah dan akan terus mengalami kontinuitas.²⁵

²⁴ Shahram Akbarzadeh and Niamatullah Ibrahim, "The Taliban: A New Proxy for Iran in Afghanistan?," 1-19.

²⁵ Sumitha Narayanan Kutty, "Iran's Continuing Interests in Afghanistan," 139-156.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ketiga literatur ini belum bisa menjelaskan perubahan apa yang terjadi sejak pengambilalihan Taliban hingga bisa memperkuat persepsi ancaman Iran terhadapnya. Selain itu, tidak ada satupun literatur yang dapat menunjukkan korelasi antara pengambilalihan Taliban dengan ancaman yang mungkin ditimbulkan terhadap kepentingan nasional Iran, terkecuali kepentingan keamanan pada literatur pertama. Sebab literatur pertama berfokus pada dampak penarikan pasukan Amerika Serikat sekaligus pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban terhadap keamanan nasional Iran. Kemudian, literatur kedua membahas mengenai dinamika hubungan Iran-Taliban pada pemerintahan Afghanistan sebelumnya, dimana Iran menggunakan Taliban sebagai instrumen untuk mencapai kepentingannya di Afghanistan. Terakhir, literatur ketiga terbatas pada tujuan strategis yang berusaha dicapai Iran di Afghanistan.

Oleh karena literatur-literatur diatas belum membahas mengenai penelitian yang akan dikaji dalam penelitian penulis, maka diperlukan penelitian lanjutan. Sehingga ketiga jurnal berikut akan dijadikan literatur pendukung dalam penelitian ini. Penelitian lanjutan akan menganalisis bagaimana Iran mempertimbangkan keempat faktor determinan dalam teori *Balance of Power* dalam mengidentifikasi potensi ancaman dari Taliban sejak mengambil alih Afghanistan. Kemudian, dilanjutkan dengan pengaruhnya terhadap kepentingan nasional Iran di Afghanistan yang mencakup kepentingan pertahanan, tatanan dunia, ekonomi, dan ideologi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk memahami kepentingan nasional yang melatarbelakangi kebijakan luar negara Iran terhadap Afghanistan, penulis akan menggunakan teori Neo Realisme, teori *Threat Perception*, dan konsep kepentingan nasional sebagai dasar kerangka berpikir.

1.5.1 Teori Neo Realisme (Kenneth N. Waltz)

Penulis akan menggunakan paradigma Neo-realisme yang dicetuskan oleh Kenneth N. Waltz sebagai dasar analisisnya, yang melihat sistem internasional sebagai penentu arah kebijakan negara. Menurut Waltz, sistem internasional terdiri dari struktur dan interaksi antar entitas politik yaitu negara, dimana struktur tersebut mengalami kontinuitas serta perubahan terus-menerus yang dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan yang terdistribusi antar negara. Dengan kata lain, perubahan dalam sistem internasional terjadi ketika negara berkekuatan besar atau yang dikenal sebagai *great power* mengalami kenaikan dan penurunan kekuatan sehingga keseimbangan kekuatan bergeser. Hal berikut dapat terlihat jelas melalui perang antar *great powers*, baik dalam sistem bipolar seperti yang terjadi selama era Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ataupun sistem multipolar yang ada sebelum dan sesudah Perang Dingin. Waltz percaya bahwa sistem bipolar lebih stabil dan mampu menjamin perdamaian serta keamanan yang lebih baik dibandingkan sistem multipolar. Dengan hanya ada dua negara berkekuatan besar, keduanya

diharapkan untuk memelihara sistem sebab secara tidak langsung mereka juga menjaga diri mereka sendiri.

Sama halnya dengan asumsi dasar Realisme Klasik, Neorealisme pun beranggapan bahwa negara merupakan aktor dengan kekuasaan tertinggi dalam politik internasional dan ia memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Maka dari itu, negara diidentifikasi sebagai aktor yang rasional karena perilakunya dalam interaksi hubungan internasional didorong oleh suatu kepentingan nasional. Sebagai aktor rasional, kepentingan utama sebuah negara adalah untuk bertahan hidup (*survive*) dengan cara melindungi kedaulatannya dan berusaha mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Sehubungan dengan itu, Waltz juga berasumsi bahwa para pemimpin negara akan mengambil tindakan secara otomatis sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Waltz meyakini akan adanya *politics in the absence of government* artinya sistem internasional adalah anarki dan tidak ada otoritas lebih tinggi yang dapat mengatur perilaku negara. Dalam sistem ini, negara diberikan pilihan untuk menggunakan *violence* dan juga *the use of force* untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sehingga dibutuhkan suatu upaya tertentu dari negara untuk melindungi dirinya sendiri apabila sewaktu-waktu negara lain menerapkan kedua cara tersebut terhadapnya. Oleh karena itu, muncul prinsip *self help* sebagai upaya yang dilakukan negara untuk melindungi dirinya dari ancaman negara lain. Pada dasarnya, prinsip

self help berusaha menunjukkan bahwa negara dapat mempertahankan kekuatannya namun juga dapat meningkatkan kekuatannya. Untuk mencapainya, negara dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, militer, dan strategisnya di bidang domestik, sekaligus memperluas aliansinya dengan negara-negara lain.

Pada gilirannya, hasil dari *self help* suatu negara berupa peningkatan kapabilitas negara akan memperbesar ketidakamanan (*insecurity*) dan mendorong terciptanya *security dilemma* dari negara lain di sekitarnya. Hal ini terjadi ketika peningkatan keamanan suatu negara menyebabkan penurunan keamanan negara lainnya. Neorealis melihat salah satu cara untuk mencapai perdamaian dan menangani *security dilemma* di sistem internasional adalah melalui *balance of power*. Menurut Waltz, *balance of power* dapat tercipta ketika kedua negara dalam suatu sistem memiliki suatu indikator, berupa kebijakan untuk menciptakan stabilitas sehingga keduanya memutuskan untuk tidak menyerang satu sama lain. *Balance of power* adalah teori yang menyatakan bila satu negara dalam sistem internasional meningkatkan kekuatannya maka akan terjadi transisi kekuatan secara global, akibatnya negara lain yang merasa terancam akan membentuk koalisi untuk melakukan *counterbalancing*. Sehingga perdamaian akan terjadi ketika sistem internasional berada di keadaan yang seimbang antar negara.

Kemudian untuk menjamin keberlangsungan hidup negara dalam sistem internasional yang anarki, Neorealisme mengemukakan dua strategi

yang dapat diimplementasikan oleh negara yaitu *balancing* dan *bandwagoning*. *Balancing* adalah strategi yang diambil negara untuk menjamin keamanannya dengan membentuk aliansi bersama dengan negara lain yang memiliki tujuan yang sama. Umumnya, negara bekerja sama dengan negara yang memiliki kekuatan dan kapabilitas yang serupa. Aliansi ini bertujuan untuk mengurangi resiko dominasi negara-negara berkekuatan besar terhadap negara yang lebih lemah, agar tercipta lebih banyak kebebasan bertindak di sistem internasional. Sementara, *bandwagoning* merupakan strategi yang diterapkan apabila negara dihadapkan dalam berbagai ancaman yang datang dari kekuatan luar. Sehingga negara cenderung bersekutu dengan negara-negara yang dianggap sebagai *source of danger*, yakni negara yang dilihat sebagai ancaman karena memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan negara lainnya. Namun, sebelum menentukan strategi yang akan diambil, negara cenderung menggunakan *balance of threat* untuk menentukan tingkat ancaman yang dirasakannya.²⁶

1.5.2 Teori Persepsi Ancaman (Raymond Cohen)

Pada awalnya, ancaman diukur melalui kemampuan militer suatu negara. Tetapi para sarjana hubungan internasional, salah satunya, Stephen M. Walt memutuskan untuk mulai melihat niatan ofensif aktor sebagai sumber ancaman.²⁷ Semenjak itu, persepsi ancaman selalu menjadi dasar

²⁶ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*. (Addison-Wesley Publishing Company, 1979).

²⁷ Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power," *International Security* 9, no. 4 (1985): 3–43, <https://doi.org/10.2307/2538540>.

dari teori perang, *deterrence*, *compellence*, aliansi, dan resolusi konflik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Thucydides ketika ia menempatkan konsep persepsi ancaman sebagai pilar dari teori *balance of power*, aliansi, dan perang. Sementara, menurut Cohen, persepsi ancaman merupakan perkiraan oleh pihak pengamat dan pembuat keputusan akan kerugian yang berpotensi muncul, baik dalam bentuk militer, strategis maupun ekonomi.

Cohen mendefinisikan ancaman sebagai “*a perception of danger.*” Dengan mengacu kepada definisi tersebut, Cohen menganalisis persepsi ancaman sebuah negara dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya yang mungkin disebabkan oleh musuh potensial. Dalam konteks ini, ancaman dapat dipahami sebagai kapabilitas dan niatan yang dimiliki oleh suatu kelompok yang mampu menciptakan konsekuensi negatif bagi kelompok lainnya, termasuk mengancam kepentingan nasionalnya. Sejalan dengan hal tersebut, proses analisis ini dilatarbelakangi oleh faktor predisposisi atau kecenderungan para pengambil keputusan dalam melihat isyarat ancaman yang ada (*threatening cue*) hingga berhasil di validasi sebagai suatu bentuk bahaya.

Cohen menyatakan bahwa kecenderungan aktor dalam mempersepsikan ancaman dapat berasal dari rasa ketidakpercayaan, kecemasan pribadi, pengalaman akan masa lalu, serta perencanaan kontijensi. Terdapat beberapa indikator penting yang membantu Iran mengenali isyarat ancaman. Pertama, hubungan historis antara aktor yang mempersepsikan ancaman dengan sumber ancaman. Kedua, pengalaman

ancaman yang dirasakan oleh pihak yang mempersepsikan ancaman sehingga membentuk rasa ketidakpercayaan yang berlebihan dan kecemasan akan peristiwa serupa. Ketiga, adanya keseimbangan kemampuan antara aktor terkait, yang mencakup kemampuan diplomatik, militer, ekonomi, serta bantuan dari sekutu. Keempat, faktor struktural yang meliputi kepentingan kelembagaan, penyusunan rencana kontinjensi, serta bagaimana bentuk dan prosedur birokrasi mampu mempengaruhi proses persepsi ancaman. Kelima, adanya pelanggaran terhadap kerangka yuridis, tempat dimana hubungan kedua aktor dilakukan dan disepakati bersama. Kerangka yuridis disini berupa perjanjian, hukum internasional, maupun norma perilaku. Terakhir, perlu dipahami kebijakan dan kepentingan yang dimiliki oleh perseptor atau aktor yang mempersepsikan ancaman di wilayah bersangkutan.

Setelah para pembuat keputusan yakin bahwa tindakan tersebut benar sebuah ancaman, kemudian mereka akan memasuki tahap penilaian atau yang dikenal sebagai *appraisal*. Proses ini terbagi menjadi empat tahapan utama. Pertama-tama, artikulasi para pembuat keputusan terutama ekspresi pribadi mereka terhadap isyarat yang mengancam. Kedua, pengamatan yang dilakukan oleh penonton kontemporer seperti diplomat asing terkait proses pengambilan keputusan. Ketiga, penilaian harus disertai oleh bukti bahwa para pembuat keputusan telah mengeksplorasi berbagai tanggapan alternatif terkait ancaman, yang bisa dicapai melalui konsultasi internal, peningkatan arus informasi baik secara internal maupun eksternal.

Terakhir, para pembuat keputusan akan memberlakukan ‘proses penanggulangan’ sebagai respons terhadap ancaman.²⁸

1.5.3 Konsep Kepentingan Nasional (Donald E. Nuechterlein)

Untuk memperdalam analisis mengenai kepentingan nasional Iran, penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara berdaulat lain, yang akan membentuk lingkungan eksternalnya. Pada dasarnya, Nuechterlein membagi kepentingan nasional pada empat kategori yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan tatanan dunia, kepentingan ekonomi, dan kepentingan ideologi.²⁹

Kepentingan pertama adalah kepentingan pertahanan dan seringkali didefinisikan sebagai perlindungan terhadap negara, warga negara, serta sistem pemerintahan dari ancaman kekerasan oleh pihak lain yang disengaja. Berikutnya, terdapat kepentingan ekonomi yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara melalui interaksi hubungan internasional. Lebih lanjut, kepentingan tatanan dunia ialah jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional. Hal ini ditujukan agar negara merasa aman sehingga warga

²⁸ Raymond Cohen, “Threat Perception in International Crisis,” *Political Science Quarterly* 93, no. 1 (1978): 93–107, <https://doi.org/10.2307/2149052>.

²⁹ Donald E. Nuechterlein, “National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Approach Analysis and Decision Making,” *British Journal of International Studies* 2, No. 3 (1976), 248, <https://www.jstor.org/stable/20096778>.

negara maupun badan usahanya dapat beroperasi di luar batas negara. Kepentingan terakhir yaitu kepentingan ideologi, dimana terdapat perlindungan terhadap seperangkat nilai yang dipegang oleh masyarakat dari negara berdaulat dan diterapkan di seluruh dunia.³⁰

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dimana penulis akan menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk menjabarkan sebuah fenomena kemudian mengaitkannya dengan fakta atas fenomena tersebut.³¹ Adapun tujuan dari metode kualitatif yaitu untuk meneliti dan memperdalam pemahaman mengenai suatu permasalahan sosial secara holistik, yang mengharuskan penulis untuk memaknai sebuah fenomena dan proses yang membentuknya.³² Keinginan penulis dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai fokus permasalahan yang sedang dikaji secara sistematis dan praktis. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian empiris yang mengeksplorasi suatu fenomena kontemporer dengan menguji proposisi suatu teori yang dikaitkan dengan unit dalam kasus tersebut.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ John W. Creswell, *Quantitative, Inquiry, and Research Design* (California: Sage Publication inc., 1998), 3.

³² Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), 64.

³³ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (London: Sage Publication, 1984), 22-23.

Pendekatan studi kasus akan digunakan untuk menjelaskan logika yang melatarbelakangi sebuah fenomena, yang mencakup alasan mengapa suatu keputusan diambil, bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan, serta pengaruhnya.³⁴ Harapannya, metode berikut dapat menggambarkan proses pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban, serta faktor-faktor yang memperkuat persepsi ancaman Iran terhadapnya, hingga dampak ketidakstabilan terhadap pemenuhan kepentingan nasional Iran.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan sebagai bentuk pengumpulan data melalui sumber data dari berbagai pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik secara empiris maupun teoritis. Sederhananya, peneliti akan mengumpulkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan deskripsi dan pemahaman mendalam mengenai subjek penelitian tanpa berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Maka dari itu, penulis akan menggunakan data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber kedua, atau dengan kata lain data yang didapat secara tidak langsung seperti buku, dokumen penelitian, karya ilmiah, dan media massa lainnya. Data dan referensi yang dilampirkan dalam penelitian didapat pun telah dipastikan validitasnya.³⁵

³⁴ *Ibid*, 29-37.

³⁵ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, 171-174.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab pembahasan agar penelitian dapat terlihat secara sistematis dan detail yang akan dibahas dalam sistematika pembahasan berikut ini:

Bab I: Pendahuluan

Bab I merupakan pendahuluan mengenai apa yang ingin diteliti dan dibahas oleh penulis. Bagian ini akan terbagi ke dalam delapan sub-bab, antara lain identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Menguatnya Persepsi Ancaman Iran terhadap Perkembangan Situasi di Afghanistan sejak Dikuasai oleh Taliban

Bab II merupakan bagian yang menganalisis bagaimana Iran mempersepsikan situasi keamanan yang terjadi di Afghanistan pasca pengambilalihan Taliban sebagai ancaman. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan teori *Threat Perception* yang dipaparkan oleh Raymond Cohen. Berdasarkan teori tersebut, penulis akan menganalisis faktor yang mendorong kecenderungan Iran untuk mempersepsikan ancaman pasca pengambilalihan kekuasaan Afghanistan oleh Taliban (*predispositional factor*), kemudian memasuki tahap penilaian ancaman (*appraisal*). Kedua tahapan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dari pengambilalihan Afghanistan.

2.1 Perkembangan Situasi di Afghanistan pasca Pengambilalihan Taliban

2.2 Faktor yang Mendorong Kecenderungan Iran dalam Mempersepsikan Pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban sebagai Ancaman

2.2.1 Faktor Historis antara Iran dengan Emirat Islam Afghanistan sebagai Isyarat Ancaman

2.2.2 Pengalaman Ancaman Di Masa Lalu antara Iran dengan Emirat Islam Afghanistan Sebagai Tanda Ancaman

2.2.3 Keseimbangan Kemampuan Ekonomi dan Militer antara Iran dengan Emirat Islam Afghanistan

2.2.4 Faktor Struktural Iran dalam Mempersepsikan Ancaman

2.2.5 Pelanggaran Perjanjian Internasional dan Norma Perilaku sebagai Kerangka Yuridis oleh Emirat Islam Afghanistan

2.2.6 Kepentingan yang berusaha dicapai Iran di Emirat Islam Afghanistan

2.3 Penilaian dan Respon Pengambil Keputusan Iran terhadap Pengambilalihan Taliban atas Afghanistan

2.3.1 Pandangan Pengamat Kontemporer Iran dalam Menilai Isyarat Ancaman

2.3.2 Respon Iran terhadap Pengambilalihan Taliban atas Afghanistan

Bab III: Terancamnya Kepentingan Nasional Iran di Afghanistan Pasca Pengambilalihan Taliban

Pada bab III, penulis akan mengelaborasi bagaimana penguatan persepsi ancaman Iran pasca pengambilalihan Taliban berpotensi menghambat pemenuhan kepentingan nasionalnya di Afghanistan. Dengan menggunakan konsep Kepentingan Nasional oleh Donald E. Nuechterlein, penulis akan membagi topik bahasan menjadi 4 bagian utama yang meliputi ancaman terhadap kepentingan pertahanan, kepentingan tatanan dunia, kepentingan ekonomi, serta kepentingan ideologi.

3.1 Ancaman terhadap Kepentingan Pertahanan Nasional Iran:
Integritas dan Kedaulatan Wilayah

3.2 Ancaman terhadap Kepentingan Tatanan Dunia Nasional Iran:
Menurunnya Konektivitas dan Stabilitas di Kawasan

3.3 Ancaman terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Iran:
Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi

3.4 Ancaman terhadap Kepentingan Ideologi Nasional Iran:
Ketidakamanan Etnis Minoritas Hazara

Bab IV: Kesimpulan

Bab IV merupakan kesimpulan dari keseluruhan hasil penulisan yang berusaha mempertegas jawaban dari pertanyaan penelitian, berdasarkan analisis data dan teori yang telah digunakan. Bagian

kesimpulan akan membahas dua temuan penting yang dideduksi dari hasil analisis. Temuan pertama akan berfokus membahas bagaimana terbentuknya persepsi ancaman Iran terhadap pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban. Kemudian penulis akan memaparkan empat bentuk ancaman kepentingan nasional yang dialami oleh Iran di Afghanistan semenjak Taliban kembali berkuasa, dengan mencakup kepentingan pertahanan, kepentingan tatanan dunia, kepentingan ekonomi, serta kepentingan ideologi.